

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA GAMPONG  
DHAM PULO KECAMATAN INGIN JAYA  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**AHMAD YASIR ARAFAT  
NIM. 190802034**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Yasir Arafat

NIM : 190802034

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 21 November 2001

Alamat : Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten  
Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah menggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juni 2023

Yang menyatakan,



**AHMAD YASIR ARAFAT**  
NIM. 190802034

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA GAMPONG  
DHAM PULO KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN  
ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**AHMAD YASIR ARAFAT**

NIM. 190802034

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Fauzi Ismail, M.Si.**

**NIP. 196805111994021001**

Pembimbing II,



**Mirza Fauzikri, S.Sos.i.,M.Si.**

**NIP. 199007022020121010**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA GAMPONG  
DHAM PULO KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN  
ACEH BESAR**

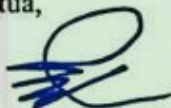
SKRIPSI

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 juli 2023 M  
22 Dzulhijjah 1444 H

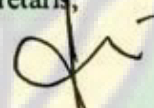
Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



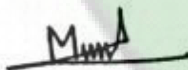
**Dr. Fauzi Ismail, M.Si**  
NIP. 196805111994021001

Sekretaris,



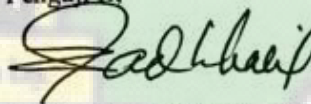
**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si**  
NIP. 199007022020121010

Penguji I,



**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
NIP. 198411252019032012

Penguji II,



**Zakki Fuad Khalil, M.Si**  
NIP. 199011192022031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Muji Mulia, M.Ag**  
NIP. 19740327199990310005

## ABSTRAK

Efektivitas pengelolaan dana desa mencerminkan kemampuan dalam merealisasikan keuangan dana desa sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan mengetahui faktor penghambat pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan dengan efektif, proses perencanaan pembangunan infrastruktur melibatkan partisipasi masyarakat dan anggaran desa yang mencapai Rp 600.000.000 Pertahunnya telah digunakan secara maksimal untuk membangun berbagai fasilitas yang diperlukan, seperti rumah sewa, rumah dhuafa, jalan, saluran air, kantor geuchik, gedung PKK, dan perbaikan pagar kantor desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, terdapat hambatan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan biaya material yang tinggi. Biaya material merupakan salah satu faktor penting dalam konstruksi atau pembangunan infrastruktur, dan tingginya biaya tersebut dapat menjadi kendala dalam melaksanakan proyek pembangunan di desa tersebut.

Kata kunci: *Efektivitas, pembangunan infrastruktur, Desa Dham Pulo*

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur Peneliti ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Penulis banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

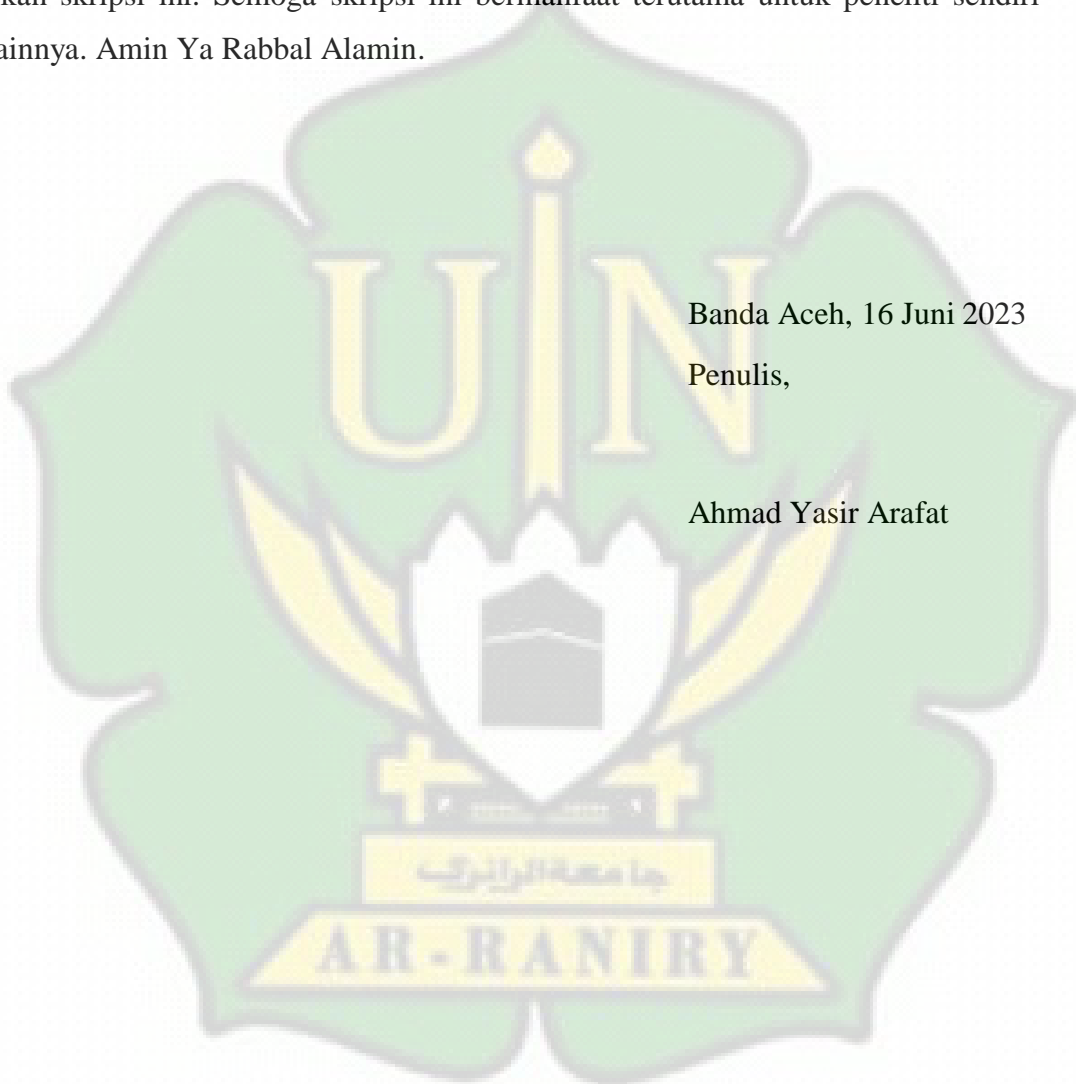
1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
3. Muazzinah , B.Sc., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry
4. Dr. Fauzi, M.Si. selaku pembimbing 1 yang telah memberikan waktu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini ; Mirza Fanzikri, S.Sos.i., M.Si. Selalu Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini
5. Terima Kasih juga penulis ucapkan kepada penguji I ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. dan penguji II Bapak Zakki Fuad Khalil, M.Si yang telah memberi ujian dan masukan terhadap skripsi penulis
6. Terima Kasih kepada Orang tua, saudara-saudara sekandung saya yang telah mendukung saya dengan penuh hati dan sudah memberi motivasi dalam masa penyusunan skripsi ini.
7. Secawan madu , sahabat karib saya dan seluruh kawan kawan prodi ilmu administrasi negara Angkatan 19 yang telah memberikan saran saran bantuan moral dan motivasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini . Namun kesempurnaan hanya milik Allah. Jika terdapat kesalahan peneliti meminta maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat terutama untuk peneliti sendiri dan lainnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 16 Juni 2023

Penulis,

Ahmad Yasir Arafat

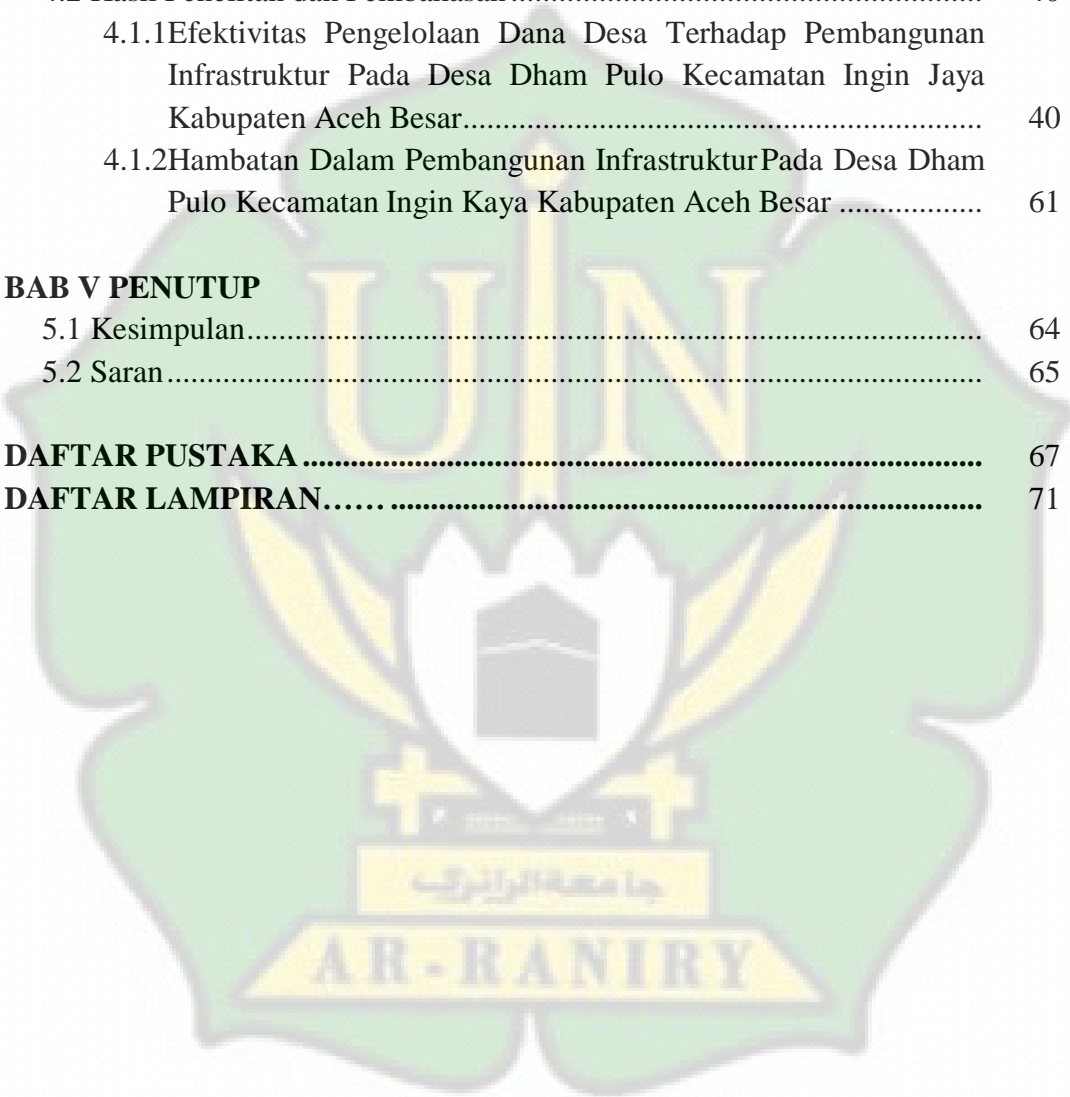


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN BIMBINGAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	10
2.2.1 Teori Efektivitas.....	10
2.1.2 Indikator Efektivitas.....	13
2.1.3 Efektivitas Pengelolaan keuangan .....	14
2.1.4 Konsep Dana Desa.....	16
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa .....	19
2.1.6 Kebijakan Penggunaan Dana Desa.....	20
2.1.7 Definisi Pembangunan.....	21
2.1.8 Pembangunan Infrastruktur Desa.....	23
2.1.9 Kewenangan Pemerintahan Gampong.....	24
2.1.10 Faktor Yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa.....	25
2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan .....	26
2.3 Kerangka Berfikir.....	28
<b>BAB: III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian .....	30
3.3 Lokasi Penelitian .....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	32



3.5 Informan Penelitian .....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	35
3.8 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	38
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	40
4.1.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar .....	40
4.1.2 Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Fokus Penelitian .....	31
3.2 Tabel Informan Penelitian .....	33
4.1 Tabel Pembagian Wilayah Administrasi .....	39
4.2 Tabel Jumlah Penduduk .....	40



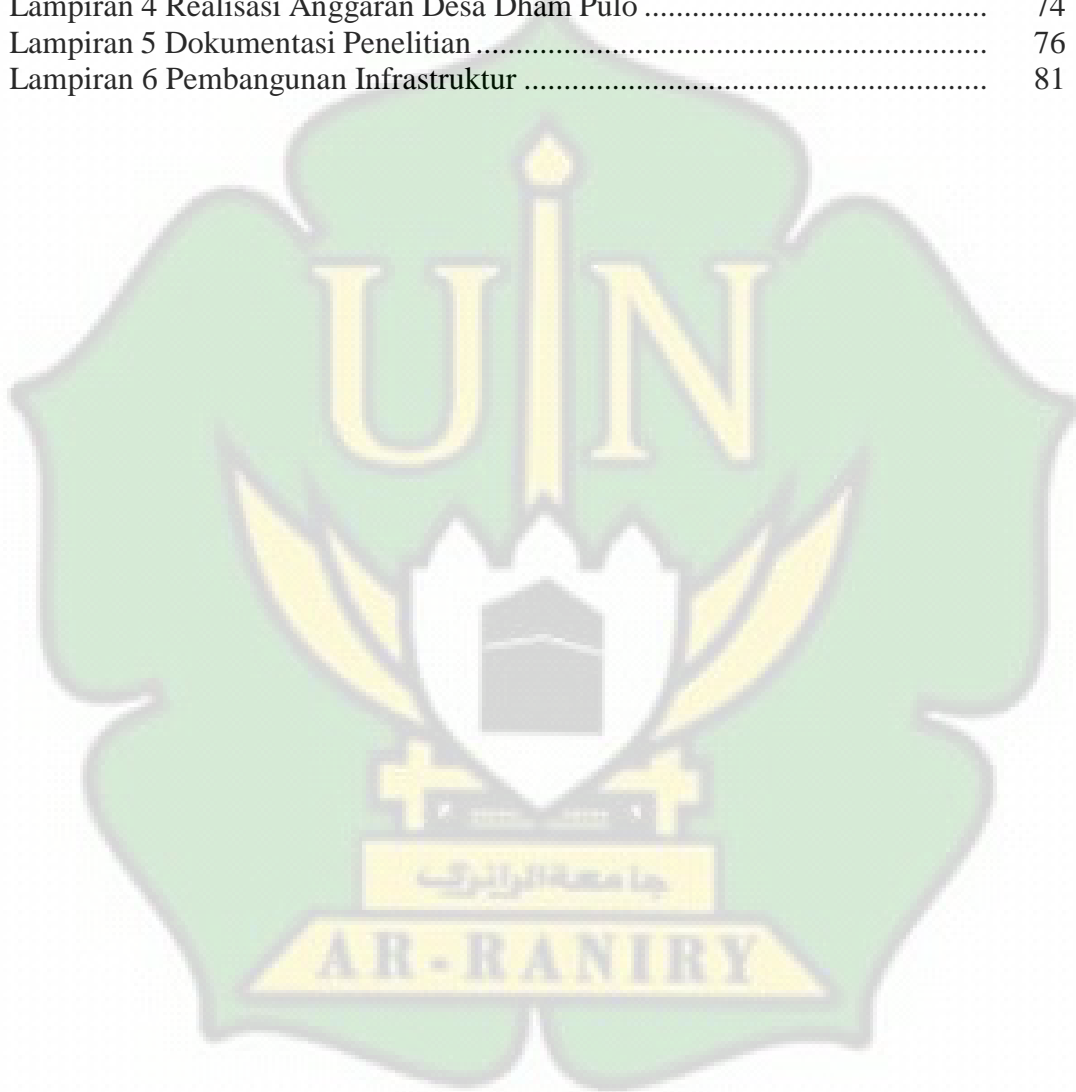
## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir .....	29
-----------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP .....	71
Lampiran 2 Surat Penelitian .....	72
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian.....	73
Lampiran 4 Realisasi Anggaran Desa Dham Pulo .....	74
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian .....	76
Lampiran 6 Pembangunan Infrastruktur .....	81



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan negara Indonesia saat ini berupaya melaksanakan upaya pada tahapan pembangunan nasional agar laju pembangunan dalam suatu daerah atau desa dapat berjalan dengan signifikan. Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yaitu dengan merencanakan pembangunan nasional, yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dalam wilayah pemerintahan Indonesia.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu bagian dari pembangunan nasional dan dipakai sebagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan warganya lewat peran partisipasinya. Pembangunan desa terbilang penting karena mempunyai peran di dalam unsur pembangunan nasional maupun pembangunan daerah yang mana terdapat unsur pemerataan pembangunan yang langsung bengenai dengan masyarakat perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Jika ingin mendapat sebuah kesuksesan tentunya kita butuh infrastruktur yang kuat dan kokoh. Infrastruktur merupakan bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonominya itu

masyarakat. Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat<sup>1</sup>.

Pembangunan desa sangat penting karena mempunyai peranan dalam rangka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perdesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau bisa disebut dengan otonomi desa. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan evaluasi yang meliputi pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa hasil dari pengawasan tersebut menjadi acuan dalam pembahasan musyawarah desa dan juga dalam kegiatan musrenbang yang diikuti oleh pemerintahan desa dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan dalam desa

---

<sup>1</sup> Donny Wahyu Wijaya, ''Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang'', Jurnal Ilmiah Administrasi publik, Vol. 2 No. 1 (Juni 2016), hal. 4.

<sup>2</sup> Archan Yudistira dkk, ''Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto'', Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.5 No. 2, 2019, hal. 1193-1194.

Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusun RPJM Desa dan RKP Desa.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia No 21 tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.<sup>4</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, partisi masyarakat dan pelayanan public.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan diberikan dana desa adalah sebagai bentuk kepedulian negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan diberinya dana desa, maka dari itu pemerintah diminta untuk menggunakan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Kabupaten Aceh Besar pada setiap tahunnya diberikan dana desa oleh pemerintah. Dengan dana yang cukup besar sekitaran senilai 600 juta bisa menjadikan wilayah tersebut maju jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun polemik yang selalu ada adalah tentang

---

<sup>3</sup> Mirza Fanzikri, '*Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh*' Jurnal Internasional Ilmu Pemerintahan Dan Sosial, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019, hal. 23.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia No 21 tahun 2021

penyimpangan dan penyalahgunaan pada penggunaan alokasi dana desa bertebaran dimana-mana. Masih banyak desa yang yang tidak efektif dalam mengelola dana desa dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini bisa terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Aceh juga mengalami hal yang sama yang terjadi di setiap kabupaten/kota di daerahnya. Gampong Dham Pulo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh juga telah menerima dana desa setiap tahunnya dari pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2021 Gampong Dham Pulo terpilih sebagai desa yang mendapatkan dana tambahan atas apresiasi desa yang tercepat dalam Penyaluran dana desa.

Gampong Dham Pulo tersendiri mempunyai rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJM-G) yang disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif enam tahunan yang akan digunakan sebagai rencana kerja pembangunan gampong (RKP-G) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang desa dan mengacu pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dan Permendes Nomor 21 tahun 2016. Demi tercapainya tujuan pembangunan Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar harus mempunyai strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang terlaksana pada saat 2016-2021. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan gampong. Adapun strategi pembangunan dalam RPJM-G ini adalah :

1. Membangun jalur transportasi yang layak



1. Meningkatkan kapasitas jalan lingkar gampong
2. Meningkatkan pembangunan fasilitas untuk perdagangan
3. Memperbaiki sarana dan prasarana jalan gampong
4. Meningkatkan ketersediaan Gedung pelatihan masyarakat
5. Meningkatkan Kenyamanan dalam beribadah
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
7. Terwujudnya fasilitas olahraga yang memadai

Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar di implementasikan berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan. Sejumlah program tersebut tidak sepenuhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh Karena itu, perlu dilakukan pemilahan program program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan Adapun program bidang pelaksanaan pembangunan gampong yang meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yaitu:

1. Jalan pemukiman berupa rabat beton
2. jalan gampong antar pemukiman ke wilayah pertanian.
3. lingkungan pemukiman ke wilayah pertanian
4. Pembangunan/pemeliharaan irigasi
5. Bangunan PKK, Serbaguna dan BUMG
6. Infrastruktur lainnya sesuai kondisi gampong

Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada gampong tersebut berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara masyarakat dan pemerintah desa. Jumlah pendapatan 2021 pada gampong tersebut yaitu 975.575.136,00 adapun anggaran belanjanya meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong senilai 375.154.320,00, bidang pelaksanaan pembangunan gampong senilai 339.197.970,00, bidang pembinaan kemasyarakatan senilai 79.440.000,00, bidang pemberdayaan masyarakat senilai 28.580.000,00, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak senilai 153.200.000,00. Jadi jumlah belanja yaitu 975.572.290,00 dan terealisasi menjadi 843.688.660,00.

Walaupun pengelolaan keuangan desa tersebut terbilang bagus tetapi pembangunan infrastruktur di desa tersebut masih perlu diperhatikan akan pembangunannya tersebut. Contohnya di Gampong Dham Pulo masih terdapat jalan yang kurang layak untuk akses perekonomian masyarakat. Pendapatan keuangan desa yang disalurkan oleh pemerintahan pusat masih kurang dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dikarenakan masyarakat pada Gampong Dham Pulo tersebut lebih menyepakati dalam hal pembangunan yang membantu masyarakat secara langsung seperti pembangunan rumah layak huni dan rumah sewa gampong.

Maka dari itu pembangunan jalan tersebut selalu menjadi prioritas poin terakhir dikarenakan terlalu banyak diperlukan dana untuk pembangunan rumah sewa dan rumah layak huni tersebut ditambah lagi untuk kebutuhan pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan non fisik. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada tanggal 21 November 2022 di desa ini ditemukan jalan

pemukiman warga yang dalam kondisi kurang baik sehingga akses perekonomian masyarakat terhambat karena jalan tersebut sering digunakan masyarakat dalam menjalani kegiatannya sehari-hari, Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) pasal 5 No. 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa adalah tentang lingkungan pemukiman, salah satunya adalah jalan (meliputi jalan pemukiman, jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata, jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian).<sup>5</sup>

Hal ini, menjadi daya tarik saya untuk melakukan penelitian ini tentang efektivitas Pengelolaan Dana Desa serta apa yang menjadi hambatan sehingga pembangunan jalan tersebut dalam kondisi kurang baik sedangkan setiap tahunnya adanya dana yang masuk dari pemerintah ke desa. Seharusnya dengan disalurkan dana desa dapat membantu akses perekonomian masyarakat melalui membiayai program pemerintah desa, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang sesuai rencana serta terbuka kepada masyarakat dalam prosesnya.

Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas juga merupakan suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Menurut Richard Steer dalam Halim, efektivitas harus dinilai atas di

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 16 tahun 2018

dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri.<sup>6</sup> Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai ide untuk mengkaji dan mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

### **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur ini adalah :

---

<sup>6</sup> Ni Wayan Budani, “ Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Karuna "EkaTaruna bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2 No 1, 2007, hal. 57.

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas , diharapkan dapat menjadikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

##### **1. Secara teoritis:**

Untuk memperdalam dan menambah serta meluaskan wawasan pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan. Hasil penelitian ini, diharapkan memberi sedikit wawasan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi negara.

##### **1. Secara praktis:**

Untuk peneliti dapat memperdalam wawasan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bisa juga dapat dijadikan acuan dan sumber referensi untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah efektif, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf terwujudnya hasil, sering atau selalu dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan *effectifnes* diartikan dengan keberhasilan dalam kamus Bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya dan dapat membawa hasil, berhasil guna seta dapat pula berarti berlaku (tentang undang undang/peraturan).<sup>7</sup>

Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Gie efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Menurut Richard Steer dalam Halim, efektivitas harus dinilai atas Tindakan yang mengalami proses yang singkat dan mendapatkan kemudahan dari

---

<sup>7</sup> Jurnal Gary Jonathan Mingkid.2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. Hal 3.

dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.<sup>8</sup>

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, Tindakan ataupun hal yang berlakunya. Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan perangsangan yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan hidup, dan lain sebagainya. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat pada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai aktivitasnya. Indikator dari efektivitas yaitu sebagai berikut.

1. Ketepatan penentuan waktu. Ketetapan penentuan waktu adalah membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokannya.
2. Ketepatan perhitungan biaya. Ketetapan Perhitungan biaya adalah mengacu pada sistem penghitungan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau mengoperasikan bisnis.
3. Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan. Ketetapan dalam pengukuran keberhasilan adalah melihat kesuksesan yang diukur dari perencanaan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Ketepatan dalam menentukan pilihan

---

<sup>8</sup> Ni Wayan Budani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Karuna "Eka Taruna bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2 No 1, 2007, hal. 57.

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam menentukan pilihan yang di rencanakan

5. Ketepatan Berpikir. Ketetapan berfikir adalah memberikan gambaran adanya sesuatu ide yang ada pada diri seseorang.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Ketetapan dalam melakukan perintah adalah kesiapan dalam mengerjakan sesuatu yang mana dari yang memberi perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketetapan dalam menentukan tujuan adalah sesuatu yang menargetkan keberhasilan melalui perencanaan yang sudah di rencanakan
8. Ketepatan sasaran. Ketetapan sasaran adalah ketetapan yang bertujuan pada objek objek yang tepat atau sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi cepat tercapai. Target tersebut sangat penting dalam setiap Lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatulembaga atau organisasi itu sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas , maka efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran yang sangat penting mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Unsur yang peting dalam konsep efektivitas pencapaian tujuan yang sesuai denga napa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan



Merupakan harapan yang di cita citakan atau suatu kondisi tetentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.<sup>9</sup>

### **2.1.2 Indikator Efektivitas**

Efektivitas dalam mengkaji suatu organisasi dapat diukur melalui berbagai kajian serta berbagai sudut pandang. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai dalam suatu organisasi. Pengukuran efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilak ukan melalui analisis efektivitas.

Adapun rasio efektivitas yang digunakan, Kepmendagri No 690.900.327, yaitu:

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jikapencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jikatingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jikatingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.

---

<sup>9</sup> Muhammad Sawir. 2020. Birokrasi pelayanan Publik. Yogyakarta: Cv budi utama. hal 126-127.

4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.<sup>10</sup>

### 2.1.3 Efektivitas Pengelolaan keuangan

Menurut Rohrke & Robinson pengelolaan keuangan adalah cara yang baik untuk mengajarkan konsumen tentang manfaat memiliki hubungan dengan Lembaga keuangan. Diantaranya adalah pendanaan dan kredit, kemampuan untuk membangun keuangan yang positif. Memberikan pelatihan pengelolaan keuangan bukanlah satu ukuran cocok untuk semua usaha. Keuangan dibagi menjadi empat kategori: awal intervensi, dasar literasi, rehabilitasi kredit dan perencanaan jangka panjang atau aset bangunan. Pengenalan pada tahap awal seringkali dapat menghilangkan kebutuhan untuk intervensi korektif pada tahap-tahap selanjutnya. Mengingat luasnya dan berbagai bahan yang tersedia, mungkin berguna untuk pertama menentukan tujuan institusi dan untuk melakukan pelatihan literasi.<sup>11</sup>

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

---

<sup>10</sup> Ridwan, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh, Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Ar-raniry 2022

<sup>11</sup> Norma Yulianti dan Meliza Silvy, ‘*Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan investasi keluarga di Surabaya*’, Jurnal bisnis dan bank, Volume 3, No. 1, May 2013, hal. 49.

### 1. Perencanaan.

Pengertian Perencanaan pembangunan adalah Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Pelaksanaan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah Suatu kegiatan untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.

### 3. Penatausahaan.

Penatausahaan adalah Suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

### 4. Pelaporan.

Pelaporan adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan.

### 5. Pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

### 2.1.4 Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dari sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>13</sup> Adapun tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ialah:

1. Meningkatkan pelayanan public di desa .
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa

---

<sup>12</sup> Intan mala Sari dan M. Faisal Abdullah, " Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung", Jurnal Ekonomi pembangunan , Vol.15 No 01, juni 2017, hal. 35.

<sup>13</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021 . Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. hal 10-11.

4. Mengatasi pembangunan kesenjangan antar
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek<sup>14</sup>

Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang proritias penggunaan dana desa tahun 2019 adalah pada bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dana dan belanja desa yang telah disetujui dan di ambil keputusan melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya menjadi prioritas kegiatan. Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, meliputi:

- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
- 2) Desa Berkembang
- 3) Desa Maju atau Desa Mandiri<sup>15</sup>

Berikut merupakan mekanisme penyaluran dana desa menurut pasal 9 Perbup No. 4 Tahun 2018 Kabupaten Aceh Besar:

1. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
2. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut ;
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat persen)

<sup>14</sup> indonesia. Undang Undang Republik Indonesia, UU No.6 tahun 2014 tentang desa

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 16 tahun 2018, 2018, hal. 12-13

- a. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
3. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
4. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
  - a. Qanun Gampong mengenai APBG
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari keuchik.
5. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Keuchik.
6. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II dari Keuchik.
7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar, Tata cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar. No 4 tahun 2018

### 2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

### 2.1.6 Kebijakan Penggunaan Dana Desa

Pemanfaatan dana desa Terlebih dahulu, berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, yang ditetapkan dalam APBD dan belanja yang disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa dapat diprioritaskan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat pembangunan, seperti:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal
2. Desa Berkembang
3. Desa Maju atau Mandiri

Pemerintah gampong mendapatkan dana untuk Aceh sesuai Perbup No.4 Tahun 2018 digunakan dalam pasal 10 untuk:

1. Pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan taraf hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan mendapat prioritas pembiayaan dari dana desa.
2. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa.
3. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dievaluasi dengan persetujuan bupati.
4. Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diprioritaskan untuk swakelola penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal, serta diupayakan untuk mengikutsertakan lebih banyak warga Gampong.



5. Penggunaan Dana Desa menjadi tanggung jawab Kechik.<sup>18</sup>

### **2.1.7 Definisi Pembangunan**

Pembangunan adalah upaya berkesimbangan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasi yang paling humanistic, yaitu semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis setiap individu memiliki aspirasi yang dinamis. Satu tujuan tercapai muncul aspirasi yang lain. Tujuan pembangunan yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>19</sup>

Menurut Easton Pembangunan adalah Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Menurut Johan Galtung definisi pembangunan yaitu Upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Fadhlul Adha Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sdgs Didesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Program Studi Ilmu Administrasi negara.. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam negeri Ar-raniry 2022

<sup>19</sup> Prof. Dr. Ir. Ali Kabul mahi, M.S. Dan Dr. Sri Indra Trigunarso, S.K.M.,M.Kes. 2017.Perencanaan Pembangunan Daerah. Kencana. hal 300.

ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.<sup>20</sup>

Pembangunan fisik dan non fisik menurut Muljarijadi secara sederhana para ahli pembangunan membagi dua makna pembangunan, yaitu dari sisi fisik dan non fisik . makna pembanguna dari sisi fisik lebih di artikam bahwa pembangunan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan jumlah dan komposisi output dan jasa sering kali dikenal dengan sebagai perubahan struktural. Pembangunan dalam artian fisik diwujutkan dengan adanya peningkatan pada jalan yang dibangun, pabrik, dan perusahaan yang menghasilkan berbagai komoditas, serta kemampuan masyarakat dalam mengkomsusmsi barang dan jasa sebagai akibat dari adanya peningkatan pendapatannya. Berikut adalah contoh dari pembangunan fisik, seperti:

1. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll,
2. Prasarana social yaitu: gedung sekolah, rumah rumah ibadah dan pukesmas
3. Prasarana pemasaran yaitu: Gedung.pasar.

Disisi lain, pembangunan non-fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Berikut contoh pembangunan non fisik seperti:

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang Kesehatan dan keluarga bereencana
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban

---

<sup>20</sup> Drajat Tri Kartono Dan Hanif Nurcholis. 2016. Konsep dan Teori Pembangunan. jakarta:Pustaka Pelajar. hal 1.6 .

4. Pelayanan untuk melayani masyarakat seperti dalam membuat ktp, kk
5. Pembuatan surat keterangan berdomisili<sup>21</sup>

### **2.1.8 Pembangunan Infrastruktur Desa**

Infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan

Jenis infrastruktur perdesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa:

1. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan,
2. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan, dan
3. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan

Pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan s/d tahap operasional dan pemeliharaan). Pelibatan masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain

1. kualitas pekerjaan yang dihasilkan,
2. keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut,
3. kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta

---

<sup>21</sup> Rusmawehni. 2016. Strategi Integrasi Pembangunan Infrastruktur. PT Inovasi Pratama . hal 43.

4. penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Dengan demikian, dibutuhkan suatu kajian tentang pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Salah satu fokus penelitian yang akan dilakukan terkait dengan dampak pelibatan masyarakat setempat pada proses pembangunan infrastruktur perdesaan.<sup>22</sup>

### **2.1.9 Kewenangan Pemerintah Gampong**

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahandesa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan yang bertugas sebagai memenuhi kebutuhan masyarakat

---

<sup>22</sup> Andi Asnudin, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*’, Jurnal Ilmiah Pembangunan, (Juni 2018), hal. 6.

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.<sup>23</sup>

#### **2.1.10. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangatlah diperlukan bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan karena masih banyak penelitian terdahulu yang meneliti pengelolaan Dana Desa yang belum berjalan baik, baik secara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam pengalokasian Dana Desa didesa yang erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu:

##### **1. Akuntabilitas.**

Menurut mahmudi akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Principal). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

##### **2. Tranparansi.**

Menurut mahmudi transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

##### **3. Partisipasi Masyarakat.**

---

<sup>23</sup> Sugiman, 'Pemerintah Desa', Jurnal Pemerintahan Desa, Vol. 7 No. 1, Juli 2018 . hal. 83.

Menurut Mardiasmo Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.<sup>24</sup>

## 2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam tulisan Wilda Sari. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)”. Dalam tulisan ini ditulis bahwa penyebab terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan desa, dapat disimpulkan ada beberapa hal yakni pertama belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal menyebabkan pembengkakan biaya diluar perhitungan.<sup>25</sup>

Selanjutnya tulisan Cindy Azizah. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Dalam tulisan ini dibahas bahwa dalam desa sukamerindu belum terlihat pembangunan spesifik seperti Gedung serbaguna dan sumur bor. Pembangunan tersebut hanya di kantor desa. Padahal Masyarakat di desa

---

<sup>24</sup> Duma Rahel Situmorang ‘*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*’, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist, Volume 5 No.1 2021. hal. 18.

<sup>25</sup> Wilda Sari ,” Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ” Program Studi Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.2020

tersebut ingin seperti desa yang lain yang sumur bor dan Gedung serbagunanya telah dibangun di titik titik masyarakat kurang mampu.<sup>26</sup>

Selanjutnya tulisan Uswatun Andini. Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh''. Hasil dari penelitian pembangunan infrastruktur di Gampong Lhong Raya tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana yang di rancang karena setiap yang direncanakan pasti ada kendala-kendala dan kebutuhan warga pun berbeda- beda, jika rencana pembuatan selokan tapi warga tidak memerlukan saluran air akan tetapi gorong-gorong maka nanti pemerintah gampong akan menyesuaikan lagi rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga.<sup>27</sup>

Persamaan yang terjadi pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama meneliti tentang penggunaan dana desa dan sama sama bertujuan untuk pembangunan serta penelitian ini sama sama berfokus pada pengelolaan sedangkan perbedaan yang terjadi pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mengkaji tentang cara pemerintahan desa mengelola dana desa berdasarkan dengan kebutuhan desa dan kesepakatan masyarakat desa dan tidak mengkaji peran perorangan serta penelitian ini hanya focus pada pembangunan

Penelitian terdahulu yang di atas lebih memerhatikan konteks peran perorangan dalam pengelolaan dana desa dan perspektif partisipasi masyarakat serta penelitian terdahulu yang di atas juga membahas semua itu tentang itu

---

<sup>26</sup> Cindy Azizah, '' Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)'' Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020

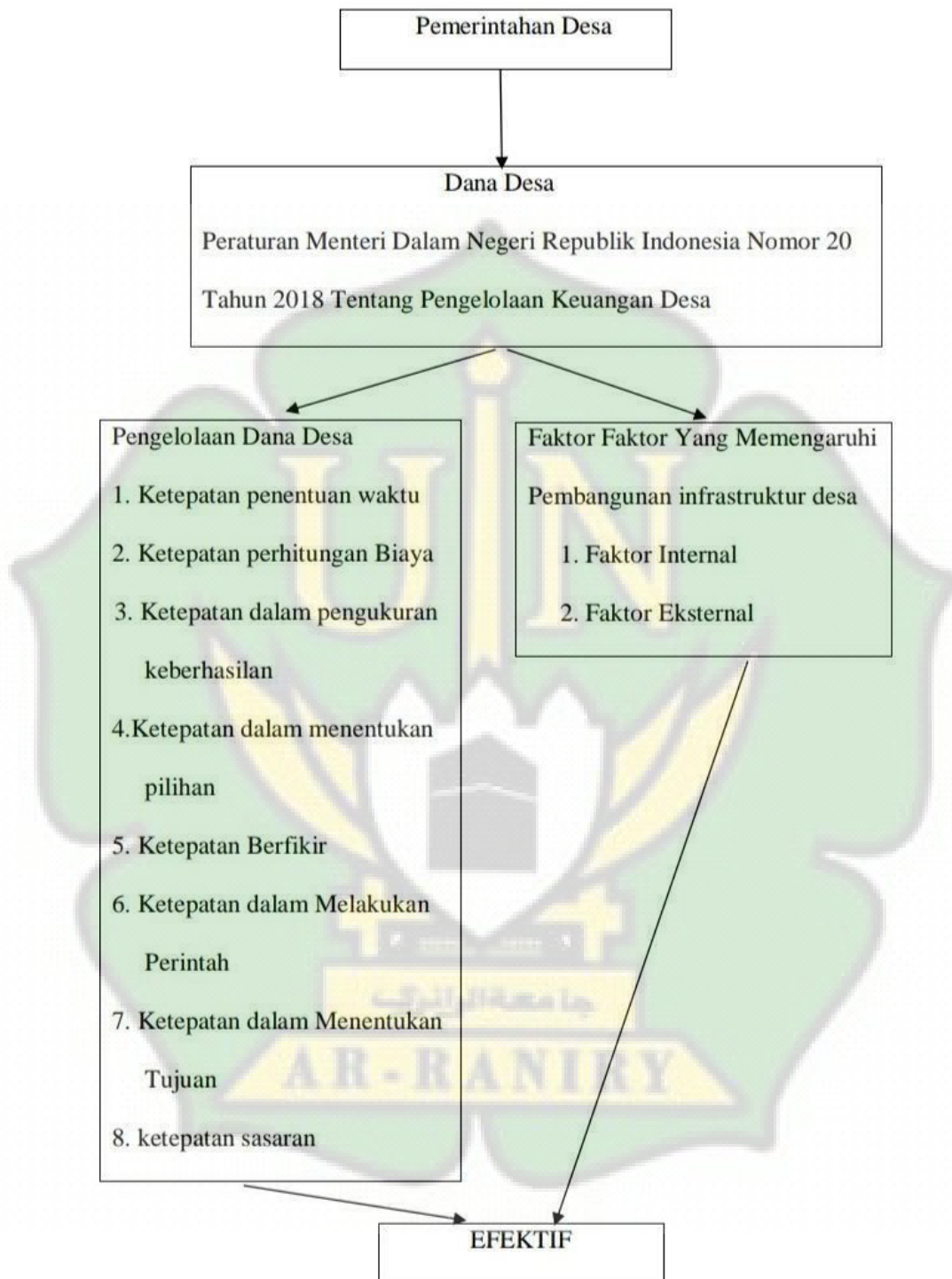
<sup>27</sup> Uswatun Andini, Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Uin Ar-raniry Banda Aceh. 2020

pengelolaan sampah untuk kebersihan . Berbeda dengan penelitian ini, penelitian terdahulu lebih melihat keresahan masyarakat sedangkan penelitian ini melihat adakah kebutuhan pembangunan masyarakat yang terpenuhi. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini, maka penulis lebih melihat pada aspek yang berbeda yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Dana desa salah satu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan oleh semua daerah demi kemajuan daerah tersebut, banyaknya polemik pada program pemerintah di daerah tertentu dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal biasa dikarenakan sering dijumpai infrastruktur yang tidak layak dan banyak infrastruktur yang dibangun tidak sesuai target. Hal ini terjadi karena lemahnya pengelolaan dan kurang pengawasan serta kontribusi/transparansi masyarakat dalam proses anggaran tersebut. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah keefektifan Pengelolaan. Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Berdasarkan beberapa teori maka digambarkan suatu kerangka berfikir sebagai alur berfikir penulis pada penelitian ini.





**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode Penelitian ini yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Alasan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami peristiwa atau fenomena fenomena yang terjadi pada objek penelitian ini. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama..<sup>28</sup>

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah untuk suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan keuangan dana desa yang berjudul

---

<sup>28</sup> Anggito dan Johan Setiawan.2018. Metodologi penelitian kualitatif. Cv Jejak (JejakPublisher). hal 7-8.

Efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada gampong dham pulo kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar.

### 3.1. Tabel Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	1. Ketepatan penentuan waktu 2. Ketepatan perhitungan Biaya 3. Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan 4. Ketepatan dalam menentukan pilihan 5. Ketepatan Berfikir 6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah 7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan 8. ketepatan sasaran	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2	Hambatan	1. Biaya material	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti karena desa tersebut yang mendapatkan apresiasi sebagai desa tercepat dalam penyaluran dana desa 2021 di Aceh Besar.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>29</sup> baik dari individu atau perseorangan seperti data yang dihasilkan dari wawancara dan dari hasil pengamatan langsung di tempat penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>30</sup> Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan (buku, jurnal, media) dan misalnya dalam penelitian ini data sekunder tetap mengenai dan tetap yang berkaitan dengan efektivitas Pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. Kegunaan data sekunder adalah untuk mendukung kredibilitas dari data-data primer. Namun, tidak sedikit juga penelitian yang murni menggunakan data sekunder dari awal. Penelitian-penelitian seperti ini biasanya bersifat "metastudy", yang mana mengakumulasi penelitian-penelitian lainnya dalam sebuah studi.

---

<sup>29</sup> Rianto Adi.2021. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal 65.

<sup>30</sup> Sugiyono,2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm 225.

### 3.5 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan supaya mendapatkan galian informasi seputaran efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dengan memilih orang yang bisa didapatkan data oleh peneliti secara jujur dan terbuka. Penelitian kualitatif. Peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang peneliti perlukan pada saat meneliti suatu objek tertentu. Oleh karena itu, pemilihan informan penelitian secara keseluruhan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut beberapa para informan yang akan di wawancarai yaitu.

#### 3.2. Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Gampong Dham Pulo	1 orang
2	Sekretaris Desa Gampong Dham Pulo	1 orang
3	Bendahara Desa Gampong Dham Pulo	1 orang
4	Kaur Pembangunan Gampong Dham Pulo	1 orang
5	Tuha Peut Gampong Dham Pulo	2 orang
6	Masyarakat Gampong Dham Pulo	3 orang
	<b>Jumlah</b>	9 orang

Adapun alasan peneliti memilih informan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan Kaur pembangunan karena mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam mengurus keuangan dana desa. Dan alasan peneliti pun

mengambil juga masyarakat sebagai informan ialah karena masyarakat langsung yang merasakan dampak pengelolaan dana desa tersebut. Selaian itu juga menetapkan informan lain seperti tuha peut karena mereka adalah tokoh penting dalam mengambil kebijakan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan , dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata.<sup>31</sup> Peneliti akan melihat secara langsung di lapangan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan melakukan pengamatan secara langsung apa saja yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Peneliti juga melakukan pengamatan dengan cara mengikuti musrenbang dan melihat apa saja keluhan dan kebutuhan yang di sampaikan oleh masyarakat . Obsevasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>32</sup> Peneliti akan mewawancarai kepala desa sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam

---

<sup>31</sup> Dr. Eko Dudiarto dan Dr. Dewi anggaeni. Epidemiologo. Egc. hal 40.

<sup>32</sup> Mukhtazar. Prosedur penelitian Pendidikan. Absolute media. Hal 78.

mengelola dana desa, serta perangkat desa yang ikut terlibat juga dalam mengelola dana desa. Peneliti dan responden akan bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dan data tertulis.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari sebuah kelompok dan individu.<sup>33</sup> Dokumentasi adalah mengumpulkan beberapa data yang diambil sebagai bahan informasi sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun dokumentasi yang diambil oleh peneliti berupa data dana desa yang berbentuk Laporan realisasi anggaran, foto, foto-foto pembangunan dan lain sebagainya

#### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus negative, kecukupan referensial, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian. Ada empat kriteria dalam pengujian keabsahan data yaitu Kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan/reliabilitas (*dependability*), dan kepastian/konfirmabilitas (*confirmability*).

##### 1. Pengujian Kredibilitas (*credibility*)

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif

---

<sup>33</sup> Ibid..., hal: 240.

terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis. kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check

## 2. Kebergantungan/Realibilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif, dependabilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

## 3. Kepastian/Konfirmabilitas (*confirmability*)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut

## 4. Keteralihan (*transferability*)

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat , Vol.12 Edisi 3, 2020, hal. 147-150.



### 3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif banyak digunakan dalam penelitian yang Mengarah pada pola pertanyaan kenapa dan bagaimana. Teknik ini sangat tepat dipakai dalam penelitian yang berusaha menggali bahasan penelitian secara mendalam. Misalnya saja, pada penelitian yang berusaha menjelaskan alasan munculnya perilaku manusia.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### 2. Display data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Umrati Hengki Wijaya. 2020. Analisis Data Kualitatif. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi geologi Jaffray. hal 115

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Dham Pulo

Desa Dham Pulo yang terletak di Kemukiman Lubuk Kecamatan Ingin Jaya, merupakan sebuah Desa yang memiliki populasi sebanyak 453 jiwa ini, yang akan terus bertambah, adalah Desa menengah. Mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani yang bercocok tanam di sawah sendiri ataupun milik orang lain dengan sistem dan syarat tersendiri. Desa Dham Pulo merupakan Desa yang terletak di sebelah tenggara Kecamatan Ingin Jaya, dengan luas 65 Ha. Adapun batas-batas Desa Dham Pulo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Dham Ceukok Kecamatan Ingin Jaya
- b. Sebelah Timur : Desa Ajee Rayeuk Kecamatan Ingin Jaya
- c. Sebelah Selatan : Desa Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya
- d. Sebelah Barat : Desa Pasie Lubuk Kecamatan Ingin Jaya

Jika dilihat dari kata, Desa Dham Pulo ini memiliki dua suku kata, yaitu “Dham” dan “Pulo”. Berdasarkan narasumber (Tgk. Zakaria-red), kata “Dham” atau “Dam” merujuk pada pintu air yang berlokasi di samping meunasah yang sekarang berdiri 4 pintu toko. Dam tersebut yang mengatur pasokan air ke persawahan penduduk di blang lubuk. Sedangkan kata “Pulo” itu berasal

letak geografis Desa yang di kelilingi oleh Krueng Aceh sebelum penggeseran. Setelah Krueng aceh digeser, maka bekas Krueng Aceh tersebut dijadikan tambak oleh penduduk Desa Dham Pulo.

## 2. Luas wilayah

Adapun luas wilayah Desa Dham Pulo adalah 65 Ha yang terdiri dari:

- a. Area Pemukiman : 22 Ha
- b. Area Pertanian : 26 Ha
- c. Area perkebunan : 11 Ha
- d. Area Perkarangan : 6 Ha

Terkait dengan administrasi pemerintahan wilayah desa terbagi ke dalam wilayah dusun. Adapun jumlah dusun adalah sebagai berikut:

### 4.1. Tabel Pembagian Wilayah Administrasi

NO	DUSUN
1.	Dusun Waki Raja
2.	Dusun Tgk. Malem
3.	Dusun Poni

## 3. Kondisi Demografi

Penduduk Desa Dham Pulo tidak mengalami pertumbuhan dari tahun 2013 sebanyak 479 jiwa sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 542 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Dusun Waki Raja, sedangkan dusun yang

berpenduduk rendah terdapat di Dusun Tgk. Malem lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**4.2. Tabel Jumlah Penduduk**

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Lk	Pr	
1	Waki Raja	51	70	103	224
2	Tgk. Malem	49	65	76	190
3	Poni	44	32	53	129

#### **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar**

Pembangunan infrastruktur Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Efektivitas pengelolaan dana desa merupakan sebuah aspek yang penting dalam pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dana desa memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut. Pengelolaan dana desa yang efektif dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Hal ini dapat

terwujud melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, peneliti menggunakan 8 indikator utama. Adapun indikator penelitian tersebut adalah 1) Ketepatan penentuan waktu. 2) Ketepatan Biaya. 3) Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan. 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. 5) Ketepatan berfikir. 6) Ketepatan dalam melakukan perintah. 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan dan 8) Ketepatan sasaran. Adapun hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat peneliti uraian sebagai berikut:

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pembangunan infrastruktur desa adalah proses pembangunan dan peningkatan fasilitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Beberapa jenis infrastruktur Desa Dham Pulo yang ditemui meliputi pembangunan beton rabat, rumah sewa desa, rumah dhuafa, jalan dan rehabilitasi kantor geuchik. Observasi awal terkait pembangunan infrastruktur desa tersebut menunjukkan upaya pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan fasilitas-fasilitas dasar. Pembangunan infrastruktur desa ini diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, kondisi perumahan, dan pelayanan publik di Desa Dham Pulo.

### **1. Ketepatan Penentuan Waktu**

Penentuan waktu yang tepat dalam melihat efektivitas pengelolaan dana

desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sangat penting untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi yang diperlukan dalam mengukur hasil dari penggunaan dana desa tersebut. Dalam menentukan waktu yang tepat, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tahapan pembangunan infrastruktur yang dilakukan, sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia, serta kondisi lingkungan dan cuaca di daerah tersebut. Dengan menetapkan waktu yang tepat, dapat dilakukan pengamatan yang komprehensif terhadap penggunaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan. Ketetapan penentuan waktu adalah membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokannya.

Pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan s/d tahap operasional dan pemeliharaan). Pelibatan masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dengan menetapkan waktu yang tepat, dapat dilakukan pengamatan yang komprehensif terhadap penggunaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan pembangunan infrastruktur desa memerlukan waktu yang cukup lama pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo

pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan atau pengembangan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin, beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa:

*“Kalau soal pembangunan disini, kita sudah melihat berapa lamanya sebuah pembangunan infrastruktur desa yang dibutuhkan, dalam pelaksanaan pembangunan memang kita butuhkan lebih cepat lebih baik, tetapi dalam pelaksanaan pembangunannya pun tergantung cuacanya juga, kesehatan pekerjanya, itukan pertimbangannya. Untuk ketentuan waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan infastruktur Desa, itu biasanya lebih kurang 1 tahun pembangunannya, ada juga yang dibawah 1 tahun, tapi kebanyakan 1 tahun.”<sup>36</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Pj Geuchik Dham Pulo dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur desa memerlukan waktu yang cukup lama. Beliau mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, kecepatan dan kualitas merupakan faktor penting. Namun, beliau juga mengakui bahwa waktu pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada faktor-faktor lain seperti cuaca dan kesehatan para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa biasanya pembangunan infrastruktur desa memakan waktu sekitar satu tahun. Namun, mereka juga menyebutkan bahwa ada beberapa proyek yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun, meskipun hal ini tidak terlalu umum.

Selanjutnya, Bapak Amir Zaki yang bertugas sebagai Ketua Tuha Peut, juga menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin pada tanggal 25 Mei 2023

*“Kalau kita melihat pembangunan infrastruktur di Desa ini memang rata-rata membutuhkan waktu yang lumayan lama, seperti bangun jalan, rumah sewa, rumah dhuafa, kantor keuchik, itukan membutuhkan waktu yang kurang lebih 1 tahun harus selesai, dan kebanyakannya memang pembangunan infrastruktur itu memakan waktu 1 tahun.”<sup>37</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Ketua Tuha Peut dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur di Desa (desa) ini umumnya membutuhkan waktu yang lama. Beliau menyebutkan beberapa jenis infrastruktur seperti pembangunan jalan, rumah sewa, rumah untuk dhuafa (orang miskin), dan kantor keuchik (kepala desa). Beliau menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sewa, rumah dhuafa, dan kantor keuchik harus diselesaikan dalam kurun waktu sekitar satu tahun dan dalam pelaksanaannya sebagian besar memang rampung dalam satu tahun.

## **2. Ketepatan Perhitungan Biaya**

Ketepatan perhitungan biaya merupakan faktor penting dalam melihat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Perhitungan biaya yang akurat dan cermat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan transparan. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, perlu memperhitungkan dengan teliti semua biaya yang terkait, seperti biaya konstruksi, pengadaan bahan material, upah tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir Zaki selaku Ketua Tuha Peut Desa Dham Pulo pada tanggal 25 Mei 2023



Selain itu, perlu juga mempertimbangkan fluktuasi harga di pasar dan perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama proses pembangunan. Dengan melakukan perhitungan biaya yang akurat, dapat dihindari adanya pemborosan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana awal. Selain itu, ketepatan perhitungan biaya juga membantu dalam mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan di Desa Dham Pulo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin, beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa:

*“Kami memperhatikan soal keuangan desa, namun memang dana desa yang ada di desa kita tidak sebesar desa yang lainnya yang mencapai 1 milyar bahkan, dana desa kita hanya berkisaran sekitar Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah), nah dari uang yang segitu kita harus memanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat juga untuk masyarakat.”<sup>38</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Pj Geuchik Dham Pulo dapat dipahami bahwa mereka memperhatikan masalah keuangan desa. Namun, mereka menyadari bahwa dana desa yang tersedia di desa mereka tidak sebesar desa-desa lain yang mungkin mencapai 1 miliar rupiah. Dana desa mereka hanya sekitar 600 juta rupiah. Meskipun jumlahnya terbatas, mereka harus memanfaatkannya secara efisien untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya hal senada di atas yang disampaikan oleh Pj Geuchik Dham Pulo, juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Badawi yang selaku bendahara desa, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin pada tanggal 25 Mei 2023

*“Setiap tahunnya dana desa tidak tetap, tetapi untuk desa Dham Pulo keseringannya memang sekitar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan ada silpa dari tahun sebelumnya, tahun 2021 desa Dham Pulo ada penambahan anggaran dari Pemkab sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), jadi dari uang itu kita maksimalkan untuk pembangunan infrastruktur di desa ini.”<sup>39</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Bendahara Desa Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya setiap tahunnya jumlah dana desa tidak tetap. Namun, untuk desa Dham Pulo, jumlah dana yang biasanya diterima adalah sekitar 600 juta rupiah. Selain itu, pada tahun 2021, desa Dham Pulo menerima tambahan anggaran sebesar 200 juta rupiah dari Pemerintah Kabupaten. Dengan total dana sebesar itu, mereka berupaya memaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Desa Dham Pulo memiliki dana desa yang tidak tetap setiap tahunnya. Secara khusus, mereka biasanya menerima sekitar 600 juta rupiah, namun pada tahun 2021 mereka mendapatkan tambahan anggaran sebesar 200 juta rupiah dari Pemerintah Kabupaten. Meskipun jumlahnya terbatas, Desa Dham Pulo berupaya memanfaatkan dana tersebut secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur desayang bermanfaat bagi masyarakat.

### **3. Ketepatan Dalam Pengukuran Keberhasilan**

Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan merupakan aspek krusial dalam melihat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Untuk

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Dham Pulo, yakni Bapak Ahmad Badawi pada tanggal 24 Mei 2023

mengukur keberhasilan tersebut, diperlukan indikator yang jelas dan terukur yang dapat menggambarkan dampak positif yang dicapai melalui penggunaan dana desa. Selain itu, perlu mempertimbangkan juga masukan dan umpan balik dari masyarakat setempat dalam mengukur keberhasilan ini.

Dengan melakukan pengukuran keberhasilan yang akurat dan menyeluruh, dapat dievaluasi secara obyektif efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo. Hasil pengukuran ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan program, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat setempat.

Selanjutnya, Bapak Amir Zaki yang bertugas sebagai Ketua Tuha Peut, juga menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

*“Kami selaku pemantau dan pengawasan di Desa Dham Pulo ini terkait pembangunan-pembangunan apa saja yang di bangun di desa ini melihat bahwasanya memang sudah memberikan manfaat untuk desa ini, bukan hanya saya yang melakukan pengawasan tetapi juga masyarakat sendiri yang juga menyampaikan ada manfaatnya setiap pembangunan infrastruktur.”<sup>40</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Ketua Tuha Peut dapat dipahami bahwasanya Mereka mengamati bahwa pembangunan-pembangunan tersebut telah memberikan manfaat yang nyata bagi desa tersebut. Tidak hanya Tuha Peut sebagai pengawas, tetapi juga masyarakat setempat memberikan masukan bahwa infrastruktur yang dibangun telah memberikan manfaat yang dirasakan secara

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir Zaki selaku Ketua Tuha Peut Desa Dham Pulo pada tanggal 25 Mei 2023

langsung oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo memiliki dampak positif dan diakui oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya, Bapak M. Sahid Kausar yang bertugas sebagai Kaur Pembangunan, menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

*“Dana Desa Dham Pulo memang tidak sebanyak dana desa di tempat lainnya, makanya kami memaksimalkan pembangunan infrastruktur desa dengan melibatkan semua golongan untuk melakukan perencanaan pembangunan desa, Alhamdulillah kami melakukan semuanya dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir, dan hari ini masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya di, keberhasilan yang kita lihat juga harus sesuai dengan rap nya, misalkan untuk pembangunan yang harganya 200 Juta, kan ada pengawasan juga di Tuha Peut.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dengan informan dapat disimpulkan bahwa pembangunan dilakukan secara baik dan telah memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Adanya pengawasan yang disebutkan juga menunjukkan bahwa tindakan pengawasan dilakukan untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo telah berhasil memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat meskipun Dana Desa terbatas. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan adanya pengawasan menunjukkan komitmen untuk mencapai hasil yang baik dalam pembangunan desa.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan kaur pembangunan Desa Dham Pulo, yakni Bapak M. Sahid 24 Mei 2023

#### **4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan**

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan faktor penting dalam melihat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terkait dengan kebutuhan dan prioritas infrastruktur di wilayah tersebut. Pemilihan proyek infrastruktur yang tepat harus didasarkan pada evaluasi yang seksama terhadap kebutuhan masyarakat, potensi dampak positif yang dapat diberikan, serta ketersediaan sumber daya manusia, teknis, dan finansial yang diperlukan. Pertimbangan juga harus diberikan pada aspek keberlanjutan jangka panjang proyek, termasuk biaya operasional, pemeliharaan, dan manajemen setelah pembangunan selesai.

Selain itu, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa pilihan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat dihasilkan pilihan proyek infrastruktur yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa Dham Pulo. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya, Bapak Amir Zaki yang bertugas sebagai Ketua Tuha Peut, juga menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

*“Pembangunan yang telah dilaksanakan sudah tepat sasaran karena mengutamakan kesejahteraan rakyat, jadi kalau secara tepat dalam menentukan pilihan dalam pembangunan apa saja, saya rasa sudah tepat, karena manfaat dari pembangunan tersebut nanti juga akan diterima oleh masyarakat, kami dari kelompok tuha peut pun mengawasi terhadap pembangunan infrastruktur desa.”<sup>42</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Ketua Tuha Peut dapat dipahami bahwasanya pembangunan yang telah dilaksanakan dianggap tepat sasaran karena mengutamakan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keputusan yang diambil dalam pemilihan jenis pembangunan dianggap tepat, karena manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa kelompoknya, yaitu kelompok tuha peut, turut mengawasi pembangunan infrastruktur desa tersebut.

Selanjutnya, Bapak Iskandar selaku masyarakat dan mantan Geuchik Desa Dham Pulo juga menjelaskan kepada peneliti, beliau menyatakan bahwa:

*“Dulu ketika saya menjadi Geuchik disini, saya memperhatikan pembangunan apa saja dalam setiap musyawarah pembangunan desa, selain itu ada juga tambahan-tambahan dari masyarakat, juga pihak tuha peut memberikan masukan, agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, nah hal-hal seperti itu kami perhatikan dalam pembangunan, jadi pilihan yang ada dapat memberikan suatu pembangunan yang tepat sasaran.”<sup>43</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Mantan Geuchik Desa Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya selama beliau menjadi Geuchik di desa saat itu ia secara aktif memperhatikan segala bentuk pembangunan melalui musyawarah pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga memberikan tambahan masukan dan pihak tuha peut juga memberikan saran untuk memastikan bahwa

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir Zaki selaku Ketua Tuha Peut Desa Dham Pulo pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat dan selaku Mantan Geuchik Desa Dham Pulo pada tanggal 28 Mei 2023

pembangunan yang dilakukan akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya memperhatikan hal-hal seperti itu dalam proses pembangunan sehingga pilihan yang diambil dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwasanya secara keseluruhan dalam pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo Sudah melihat kepentingan masyarakat, artinya pembangunan yang telah dilakukan sudah tepat sasaran. Dalam proses musyawarah pembangunan desa, ada banyak pihak yang memberikan masukan serta sasaran. Oleh karena itu, keputusan pembangunan didasarkan pada manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat.

##### **5. Ketepatan Dalam Berfikir**

Ketepatan dalam berfikir menjadi hal yang krusial dalam melihat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan berfikir yang rasional, kritis, dan sistematis untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, serta merumuskan solusi yang tepat. Berfikir secara tepat akan melibatkan pengumpulan dan analisis data yang akurat terkait dengan kebutuhan infrastruktur, potensi pengembangan, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Selain itu, pemikiran yang matang juga akan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang relevan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berfikir secara holistik dan terintegrasi akan memungkinkan identifikasi dan penerapan pendekatan terbaik untuk pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

Selain itu, berfikir kreatif juga penting dalam mencari alternatif solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan berfikir secara tepat, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan pembangunan infrastruktur dengan lebih baik, dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan maksimal untuk meningkatkan pembangunan di Desa Dham Pulo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin, beliau menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

*“Saya rasa semua pembangunan ini bermanfaat, artinya kalau ini hasil dari musyawarah rencana pembangunan Desa berarti ini sudah menjadi kesepakatan bersama, kami pasti memikirkan yang terbaik untuk pembangunan infrastruktur di Desa ini, seperti pembangunan rumah sewa yang digunakan untuk masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri dan juga ada rumah dhuafa yang kita bangun, jalan untuk aktivitas dan ada yang lain lagi, itu berdasarkan komunikasi yang kita bangun, sehingga melahirkan pembangunan infrastruktur desa yang bertujuan untuk memberikan manfaat.”<sup>44</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Pj Geuchik Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya semua pembangunan tersebut memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah, di mana itu

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin pada tanggal 25 Mei 2023



seluruh pihak terlibat dalam memikirkan yang terbaik untuk pembangunan infrastruktur di Desa tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa:

*“Pembangunan yang telah dilakukan disini itu merupakan hasil dari Musrembangdes, jadi pembangunan-pembangunan yang dijalankan tersebut merupakan buah dari musyawarah, jadi saya anggap ini menjadi suatu hal yang baik, karena bukan rencana dari satu orang dan saya rasa ini sudah efektif terhadap pembangunan infrastruktur desa dan juga setelahnya juga dilakukan pengawasan oleh masyarakat dan tuha peut.”<sup>45</sup>*

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pembangunan yang telah dilakukan di suatu tempat merupakan hasil dari Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembangunan tersebut bukanlah hasil dari keputusan individu, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam desa.

## **6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah**

Ketepatan dalam melakukan perintah menjadi hal yang penting dalam melihat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, perintah yang diberikan harus jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ketepatan dalam menyampaikan instruksi memastikan bahwa semua tugas terkait pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan tepat

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan pada tanggal 25 Mei 2023

sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa perintah yang diberikan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk aparat pemerintah desa, komite dana desa, dan masyarakat setempat. Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang tepat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perintah yang telah diberikan diikuti dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan melakukan perintah yang tepat, pengelolaan dana desa dapat berjalan lancar, sumber daya dapat dimanfaatkan dengan efisien, dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin, beliau menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

*“Saya selalu memperhatikan bagaimana saat pembangunan infrastruktur yang berlangsung, hal ini saya lakukan agar tidak menjadi salah paham dan salah komunikasi, saya juga memantau sesekali para pekerja ini dan memberikan arahan-arahan bagaimana bagusnya, saya juga tidak mau membiarkan begitu saja pembangunannya, sesekali juga dating Sekdes yang memberikan arahan untuk para pekerja dan juga tuha peut yang memantau.”<sup>46</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Pj Geuchik Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya ia secara teratur memantau para pekerja yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Selain itu, ia memberikan arahan dan petunjuk kepada

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin pada tanggal 25 Mei 2023

mereka tentang cara melakukan pekerjaan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa beliau aktif terlibat dalam pengawasan dan pengendalian proses pembangunan. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa ia tidak membiarkan pembangunan berjalan tanpa pengawasan

Selanjutnya, Bapak Iskandar selaku masyarakat dan mantan Gechik Desa Dham Pulo juga menjelaskan kepada peneliti, beliau menyatakan bahwa:

*“Pada saat saya menjadi Geuchik dulu, pembangunan yang dilakukan juga membutuhkan arahan dan perintah untuk para pekerja, arahannya jelas. Bila tidak diberikan arahan, yang ditakutkan para pekerja itu bisa bekerja seperti yang mereka mau, dan pun bila kita berikan perintah juga akan efektif, kita bisa tahu kapan siap dan apa saja kendala yang didapatkan, maka dari itu kita juga perlu mengarahkan mereka untuk bisa bekerja dengan baik, karena pembangunan yang disusun akan bermanfaat untuk masyarakat bahkan sampai puluhan tahun bisa memberikan manfaat.”<sup>47</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Mantan Geuchik Desa Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya bila tanpa arahan yang jelas, para pekerja dapat bekerja sesuai keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, beliau berpandangan bahwa memberikan arahan kepada para pekerja merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya mereka memiliki pendekatan yang sangat serius terhadap pembangunan. mereka mengakui pentingnya memberikan arahan dan perintah yang jelas kepada para pekerja agar pekerjaan dapat dilakukan dengan benar.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat dan selaku Mantan Geuchik Desa Dham Pulo pada tanggal 28 Mei 2023

Melalui arahan tersebut, mereka dapat mengendalikan proses pembangunan, mengatasi kendala yang mungkin muncul, dan memastikan bahwa hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kesadaran narasumber terhadap pentingnya pengawasan dan keterlibatan dalam pembangunan mencerminkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan komitmen dalam memastikan pembangunan yang berkualitas.

## **7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan**

Ketepatan dalam menentukan tujuan menjadi hal yang krusial dalam melihat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, perlu ada kesepakatan yang jelas dan komprehensif antara semua pemangku kepentingan terkait tujuan pembangunan infrastruktur. Ketepatan dalam menentukan tujuan akan memastikan bahwa penggunaan dana desa difokuskan pada aspek-aspek yang paling penting dan mendesak untuk masyarakat setempat. Penentuan tujuan yang tepat akan melibatkan analisis kebutuhan dan aspirasi masyarakat, identifikasi prioritas pembangunan infrastruktur, serta ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang diperlukan.

Selain itu, tujuan yang ditetapkan juga harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan kebijakan nasional yang relevan. Dengan menentukan tujuan secara tepat, pengelolaan dana desa dapat berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Dham Pulo. Selain itu, tujuan yang jelas dan terukur juga

memungkinkan pengukuran efektivitas pengelolaan dana desa secara objektif, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa:

*“Dalam setiap pembangunan infrastruktur desa, tentunya memiliki manfaatnya dan tujuannya adalah untuk masyarakat, kami selaku perangkat desa melakukan berbagai komunikasi dalam membangun desa agar lebih maju, tujuannya adalah untuk masyarakat Desa dan pembangunan Desa yang lebih baik dengan memanfaatkan dana desa yang tersedia.”<sup>48</sup>*

Selanjutnya, hal senada di atas juga disampaikan oleh Bapak M. Sahid Kausar yang bertugas sebagai Kaur Pembangunan, beliau mengatakan kepada peneliti, bahwa:

*“Setiap pembangunan yang kita rancang dan dilaksanakan, itu memang berlandaskan pada tujuan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, setiap pembangunan infrastruktur itu memang memiliki tujuannya dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu, seperti waktu pembangunan dan anggaran yang digunakan itu berjumlah berapa, tidak mungkin rasanya kami menggunakan dana desa untuk membangun hal yang tidak menuai manfaat, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan-kepentingan untuk Desa.”<sup>49</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Sekretaris Desa dan Kaur Pembangunan Desa Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Setiap pembangunan direncanakan dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk waktu dan anggaran yang digunakan. Penggunaan dana desa

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Dham Pulo, yakni Bapak M. Sahid 24 Mei 2023

diarahkan untuk pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kepentingan-kepentingan Desa Dham Pulo. Para perangkat desa berkomitmen untuk memajukan desa dengan melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka membangun desa yang lebih maju dan berkembang.

Kemudian, salah satu masyarakat Desa Dham Pulo, Yakni Bapak M.Nasir menyampaikan kepada peneliti bahwa:

*“Semua pembangunan di desa ini sudah kami rasakan manfaatnya, seperti pembangunan jalan dan rumah-rumah sewa, saya selaku salah satu masyarakat yang sewa rumah tersebut tidak takut untuk pindah rumah sewa karena alasan mau dijual atau gimana, kalau rumah Desa kan selagi masih bisa bayar kita bisa tinggal disini sampai kapanpun kita mau, ya saya merasa bersyukur juga dengan adanya rumah sewa Desa.”<sup>50</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat dipahami bahwasanya masyarakat desa merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan rumah sewa telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Sebagai salah satu penyewa rumah, mereka tidak merasa khawatir atau takut untuk pindah karena adanya jaminan bahwa rumah sewa tersebut tidak akan dijual atau disengketakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya Para perangkat desa berkomitmen untuk memajukan desa melalui komunikasi yang efektif dan penggunaan dana desa yang tersedia. Pembangunan tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk waktu dan anggaran yang digunakan, agar tercapai hasil yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur desa

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dham Pulo, yakni Bapak M. Nasir pada tanggal 28Mei 2023

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kepentingan desa, dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi penghuni desa.

## **8. Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran menjadi faktor penting dalam melihat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sasaran yang tepat harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memiliki dampak positif yang nyata. Dalam menentukan sasaran, perlu dilakukan analisis yang seksama terkait dengan kondisi, tantangan, dan potensi pembangunan di Desa Dham Pulo.

Penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan jangka panjang, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang dibangun. Sasaran yang tepat harus dapat diukur dan terukur, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian yang telah dicapai. Selain itu, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan sasaran akan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan menetapkan sasaran yang tepat, pengelolaan dana desa dapat lebih terarah, efisien, dan efektif dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa:

*“Saya rasa pembangunan-pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo ini sudah tepat sasaran ya, dalam artian banyak masyarakat yang*

*merespon positif terhadap pembangunan-pembangunan yang ada disini, dan pun dalam membahas masalah pembangunan ini juga ada masyarakat yang ikut memberikan masukan-masukan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo.”<sup>51</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Sekretaris Desa Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo dianggap berhasil dan tepat sasaran. Banyak masyarakat yang memberikan respon positif terhadap pembangunan-pembangunan yang dilakukan di desa tersebut. Selain itu, masyarakat juga aktif memberikan masukan terkait pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo.

Selanjutnya, Bapak Amir Zaki yang bertugas sebagai Ketua Tuha Peut, juga menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

*“Menurut saya mengenai tepat sasaran tersebut, saya sudah melihat bahwasanya pembangunan yang ada sudah tepat sasaran ya, bahkan ada juga yang menyampaikan terima kasih kepada saya karena telah menyarankan pembangunan rumah sewa, sehingga masyarakat Desa ini pun tidak harus mencari rumah sewa ke daerah lain, selanjutnya ada saluran air yang kita bangun, ada juga rumah dhuafa, saya rasa pembangunan infrastruktur desa disini sudah tepat sasaran walaupun ada keterbatasan biaya.”<sup>52</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Ketua Tuha Peut dapat dipahami bahwasanya pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo dianggap berhasil dan tepat sasaran. Beliau telah melihat langsung bahwa pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, beliau juga menerima respons positif dari masyarakat serta manfaat yang dirasakan oleh mereka

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir Zaki selaku Ketua Tuha Peut Desa Dham Pulo pada tanggal 25 Mei 2023



mengindikasikan kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo dianggap berhasil dan tepat sasaran. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan juga menunjukkan adanya partisipasi yang kuat dalam proses pembangunan. Meskipun terdapat keterbatasan biaya, pembangunan infrastruktur tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif. Adanya respons positif dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan tersebut telah membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat.

#### **4.2.2. Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Kaya Kabupaten Aceh Besar**

Hambatan merupakan segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau seseorang dalam melaksanakan sesuatu, sehingga oleh karena itu dalam pelaksanaannya menimbulkan kendala dalam mencapai tujuan. Hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar merujuk pada berbagai faktor atau kendala yang dapat menghambat atau memperlambat proses pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Adapun hambatan pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

## 1. Biaya Material

Biaya bahan material merujuk kepada jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan dan material yang digunakan dalam proses produksi atau konstruksi. Biaya ini mencakup pembelian bahan mentah, seperti semen, kayu, beton, besi atau produk-produk lain yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin, beliau menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

*“Dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur desa yang menjadi penghambat yaitu dari segi letak aceh di ujung Indonesia sehingga harga harga material sangat lambung, itu biasanya yang menjadi faktior penghambat, karena kami pun juga tidak bisa menghabiskan uang untuk sekali belanja untuk pembangunan, karena kita juga kekurangan anggaran desa, enggak banyak seperti desa lain.”<sup>53</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo dapat dipahami bahwa alam pembangunan infrastruktur desa, salah satu faktor penghambat yang signifikan adalah letak Aceh yang berada di ujung Indonesia. Menurut responden, karena jarak yang jauh dari pusat distribusi material konstruksi, harga material menjadi sangat tinggi. Hal ini memberikan hambatan dalam upaya pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo.

Selanjutnya, hal senada di atas juga disampaikan kepada peneliti oleh Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Pj Geuchik Desa Dham Pulo, yakni Bapak Zainuddin pada tanggal 25 Mei 2023

*“Faktor penghambat dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa disini biaya material yang tidak menentu, kebanyakan memang harganya mahal, jadi biasanya itu yang jadi penghambatnya dalam pembangunan infrastruktur, kalau kendala lain karena kami tidak begitu banyak uang desa, jadi harus bisa mengoptimalkan seadanya untuk pembangunan yang ada di Desa Dham Pulo.”<sup>54</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Sekretaris Desa Dham Pulo dapat dipahami bahwasanya salah satu faktor penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Dham Pulo adalah biaya material yang tidak menentu. Beliau menjelaskan bahwa harga material konstruksi cenderung mahal, yang menyebabkan kendala dalam upaya pembangunan infrastruktur. Tingginya harga material ini menjadi hambatan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya harga material yang tinggi dan keterbatasan anggaran desa menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Dham Pulo. Untuk mengatasi kendala ini, desa perlu mencari solusi yang kreatif dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan cara yang efisien. Selain itu, dapat menjadi penting bagi pemerintah atau pihak terkait untuk mempertimbangkan upaya dalam menstabilkan harga material dan meningkatkan alokasi anggaran bagi desa-desa dengan keterbatasan sumber daya.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Dham Pulo, yakni Bapak Gunawan pada tanggal 25 Mei 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, maka peneliti mendeskripsikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar telah dilakukan dengan maksimal dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat di dalamnya. Dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur, para perangkat desa telah melakukan musyawarah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Dham Pulo. Pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran desa per tahunnya sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah sewa, rumah dhuafa, jalan, perbaikan saluran air, membangun kantor geuchik, membangun gedung PKK dan memperbaiki pagar kantor desa. Jadi pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo sudah efektif dan bermanfaat untuk masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo terdapat hambatan, salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah biaya

material yang tinggi. Biaya material merujuk pada biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan atau material yang digunakan dalam konstruksi atau pembangunan infrastruktur Desa Dham Pulo.

## 5.2. Saran

Saran untuk Pemerintah Desa:

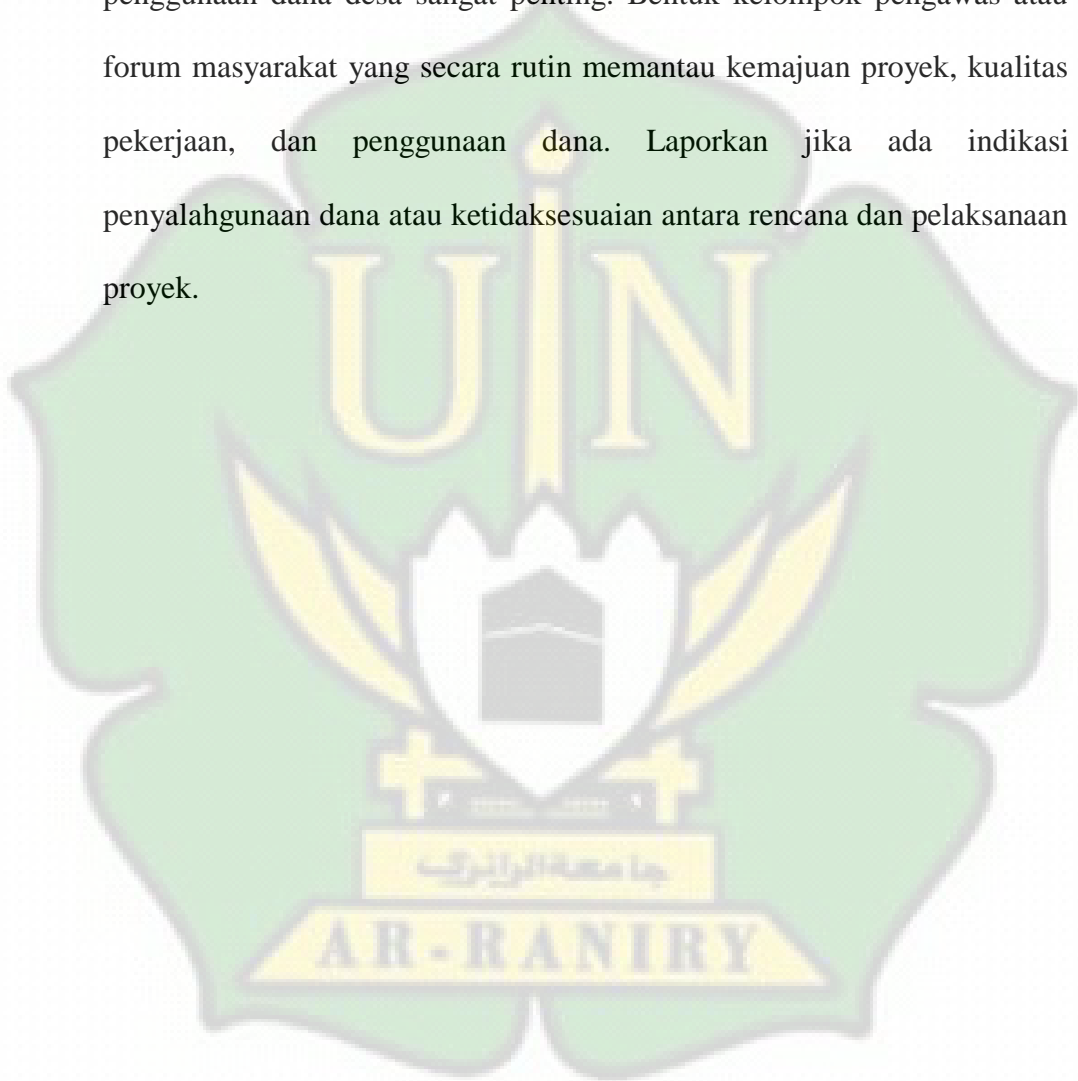
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Partisipatif: Libatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Selenggarakan pertemuan, diskusi, atau musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur yang perlu dibangun. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, keputusan yang diambil akan lebih akurat dan dapat mencerminkan kebutuhan sebenarnya.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pastikan proses pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasikan kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa, rencana penggunaan, dan hasil pembangunan yang telah dicapai. Buatlah laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat agar mereka dapat memantau penggunaan dana desa secara langsung.

Saran untuk Masyarakat:

1. Partisipasi Aktif: Sampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan konstruktif kepada pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur. Ikuti rapat-rapat desa, forum diskusi, atau musyawarah desa yang diselenggarakan

untuk memastikan suara dan kepentingan masyarakat terwakili dengan baik.

2. Pengawasan Bersama: Peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa sangat penting. Bentuk kelompok pengawas atau forum masyarakat yang secara rutin memantau kemajuan proyek, kualitas pekerjaan, dan penggunaan dana. Laporkan jika ada indikasi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan proyek.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Dr. Eko Dudiarto dan Dr. Dewi anggaeni. *Epidemiologo*, (Egc).
- Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis. 2016. *Konsep dan Teori Pembangunan*, (jakarta:Pustaka Pelajar).
- Jogiyanto Hartono. 2019. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis data*.
- Jurnal Gary Jonathan Mingkid. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021 . *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara).
- Muhammad Sawir. 2020. *Birokrasi pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Cv budi utama).
- Mukhtazar. *Prosedur penelitian Pendidikan*, (Absolute media).
- Mustofa abi hamid, dkk. 2021. *Pengelolaan Pendidikan*, (Yayasan
- Prof. Dr. Ir. Ali Kabul mahi, M.S. Dan Dr. Sri Indra Trigunarso, S.K.M., M.Kes 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Kencana).
- Rianto Adi. 2021. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Rusmawehni. 2016. *Strategi Integrasi Pembangunan Infrastrukturu*, (PT Inovasi Pratama).
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Umrati Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif. Sulawesi Selatan*. (Sekolah Tinggi geologi Jaffray).

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

- Andi Asnudin, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*’, Jurnal Ilmiah Pembangunan, 2018.
- Archan Yudistira dkk, ‘*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari*

- Kabupaten Mojokerto*”, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.5 No. 2, 2019.
- Arnild Augina Mekarisce, *”Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* , Vol.12 Edisi 3, 2020.
- Donny Wahyu Wijaya, *”Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang”* , Jurnal Ilmiah Administrasi publik, Vol. 2 No. 1, Juni 2016.
- Duma Rahel Situmorang *’Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance’* , Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist, Volume 5 No.1. 2021.
- Intan mala Sari dan M. Faisal Abdullah, *” Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung”*,Jurnal Ekonomi pembangunan , Vol.15 No 01 Juni 2017.
- Mirza Fanzikri, *’Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh”*Jurnal Internasional Ilmu Pemerintahan Dan Sosial, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019.
- Muhammad Faishal Haq, *’ Analisis standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan menengah”*,Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1 No 1, Maret 2017.
- Ni Wayan Budani, *’ Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Karuna "Eka Taruna bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”*,Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2 No 1, 2007.
- Norma Yulianti dan Meliza Silvy, *’Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan investasi keluarga di Surabaya”* , Jurnal bisnis dan bank , Volume 3, No. 1, May 2013.



Siti Istiqomah, ‘*Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*’, Jurnal Unair, Vol.1 No 1, 2015.

Sugiman, ‘*Pemerintah Desa*’, Jurnal Pemerintahan Desa, Vol. 7 No. 1, Juli 2018

### **Skripsi/Tesis**

Cindy Azizah,. 2020. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. **Skripsi**. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung.

Fadhlul Adha. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sdgs Didesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan*, **Skripsi**. Program Studi Ilmu Administrasi negara.. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam negeri Ar-raniry

Ridwan. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda aceh* , **Skripsi** Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Ar-raniry.

Uswatun Andini. 2020. *Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh.*, **Skripsi**. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Uin Ar-raniry Banda Aceh.

Wilda Sari. 2020. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang* .**Skripsi**. Program Studi Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

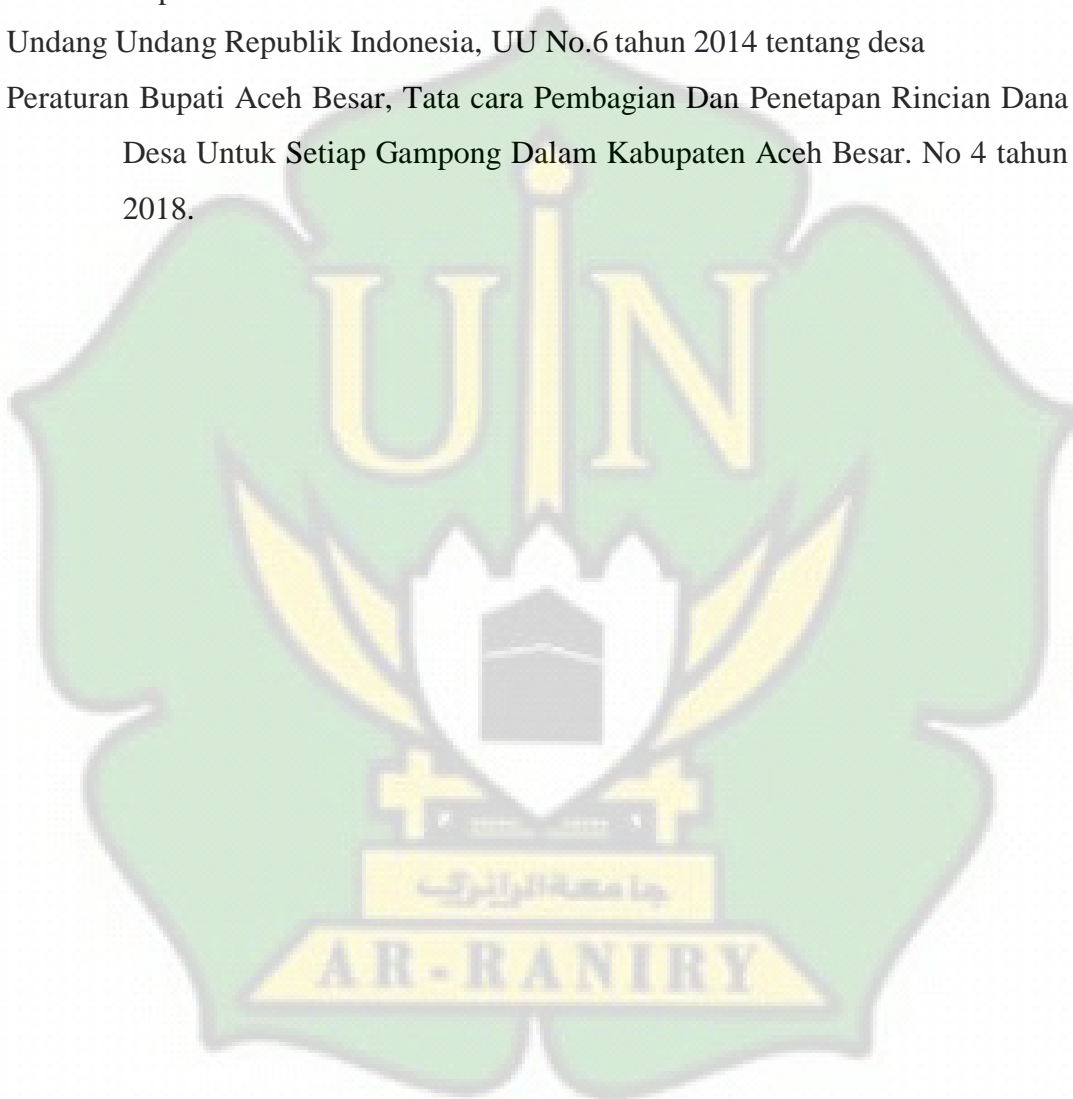
**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia No 21 tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 16 tahun 2018.

Undang Undang Republik Indonesia, UU No.6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Bupati Aceh Besar, Tata cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar. No 4 tahun 2018.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 623/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
  - b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Fauzi, M.Si.                | Sebagai pembimbing I  |
| 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. | Sebagai pembimbing II |
- Untuk membimbing skripsi :
- |               |   |
|---------------|---|
| Nama          | Ahmad Yasir Arafat  |
| NIM           | 190802034   |
| Program Studi | Ilmu Administrasi Negara  |
| Judul         | Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar |
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan :

## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1039/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Pemerintah Gampong Dham Pulo  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AHMAD YASIR ARAFAT / 190802034**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 November  
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

**AR-RANIRY**

### Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian



## PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR KECAMATAN INGIN JAYA GAMPONG DHAM PULO

Jl. Tgk. Cot Malem, Gp. Dham Pulo, Kemukiman Lubok, Kec. Ingin Jaya Kode Pos: 23371

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN Nomor : 420/043/2023

Keuchik Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : AHMAD YASIR ARAFAT / 190802034  
 Program Tingkat : S-1  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Gampong Dham Pulo Kec. Ingin Jaya – Aceh Besar  
 Judul Penelitian : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian skripsi yang berlokasi di Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mulai tanggal 24 Mei s/d 10 Juni 2023.

Demikian kami sampaikan untuk keperluan Administrasi yang bersangkutan.

Dham Pulo, 11 Juni 2023  
 Di Keuchik Gampong Dham Pulo  
  
 (Zaluddin)

## Lampiran 4 Realisasi Anggaran Desa Dham Pulo

### LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DHAM PULO TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN 1	ANGGARAN 2	REALISASI 3	LEBIH/(KURANG) 4
<b>PENDAPATAN GAMPONG</b>			
Pendapatan Asli Gampong	14.000.000,00	14.000.000,00	-
Dana Desa	610.083.000,00	610.083.000,00	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	10.145.166,00	10.145.166,00	-
Alokasi Dana Gampong	270.285.820,00	270.285.820,00	-
Koreksi Sisa Kas Tahun-Tahun Sebelumnya	5.219.610,00	5.219.610,00	-
SILPA Tahun Sebelumnya (SILPA 2020)	65.841.540,00	65.841.540,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>975.875.136,00</b>	<b>975.875.136,00</b>	<b>-</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG</b>	<b>375.154.320,00</b>	<b>327.740.670,00</b>	<b>47.413.650,00</b>
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00	29.119.680,00	-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	177.758.640,00	152.292.240,00	25.466.400,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	54.957.000,00	41.783.750,00	13.173.250,00
Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	37.200.000,00	37.200.000,00	-
Penyediaan Operasional TPG	3.525.000,00	3.525.000,00	-
Penyediaan Insentif Staf lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	-
Penyediaan Tunjangan Imeum Menasah	12.000.000,00	12.000.000,00	-
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.900.000,00	32.420.000,00	480.000,00
Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Gampong	3.200.000,00	-	3.200.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG Reguler)	1.190.000,00	-	1.190.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll)	11.500.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ dll)	1.250.000,00	1.250.000,00	-
Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun/Percek selain Perencanaan/Keuangan)	954.000,00	50.000,00	904.000,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG</b>	<b>339.197.970,00</b>	<b>330.251.640,00</b>	<b>8.946.330,00</b>
Penyelenggaraan TPQ - Beut Bakda Magrib	21.600.000,00	21.600.000,00	-
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (obat, Insentif, KB, dsb)	10.574.000,00	9.382.106,00	1.191.894,00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.740.000,00	35.476.000,00	1.264.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.800.000,00	3.800.000,00	-
Penyelenggaraan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.780.000,00	7.680.000,00	100.000,00
Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	15.000.000,00	12.277.000,00	2.723.000,00
Pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni - Saibiah	84.713.238,50	82.545.271,00	2.167.967,50
Operasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sewa Milik Gampong	131.194.731,50	129.695.263,00	1.499.468,50
Penyediaan Cermin Cembung di Jalan Gampong	2.400.000,00	2.400.000,00	-
Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Balitro Dll)	10.396.000,00	10.396.000,00	-
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>79.440.000,00</b>	<b>56.524.850,00</b>	<b>22.915.150,00</b>
Pembinaan Group Kesenian Dalatil Khairat	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam	18.600.000,00	17.480.000,00	1.120.000,00
Penyelenggaraan Festival Kuliner	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Pemberian Santunan untuk Anak Yatim	2.100.000,00	2.100.000,00	-
Penyediaan Operasional Pengajian Masyarakat Gampong	9.840.000,00	9.840.000,00	-
Penyediaan Operasional Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK & Kepemudaan)	3.800.000,00	1.550.000,00	2.250.000,00
Penyediaan Operasional & Perlengkapan PKK	28.800.000,00	22.254.850,00	6.545.150,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>28.580.000,00</b>	<b>11.644.000,00</b>	<b>16.936.000,00</b>
Pelatihan Hukum dlm Pengelolaan Keuangan	7.500.000,00	-	7.500.000,00
Pelatihan Pengelolaan SIGAP (Sistem Informasi Gampong)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Gampong	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	4.000.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00
Pelatihan Jahit Menjahit	10.080.000,00	9.544.000,00	536.000,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>	<b>153.200.000,00</b>	<b>117.527.500,00</b>	<b>35.672.500,00</b>
Kegiatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 (8%)	48.800.000,00	16.727.500,00	32.072.500,00
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	104.400.000,00	100.800.000,00	3.600.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>975.572.290,00</b>	<b>843.688.660,00</b>	<b>131.883.630,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.846,00</b>	<b>131.886.476,00</b>	<b>- 131.883.630,00</b>

DHAM PULO, 16 Januari 2022  
Keuchik Dham Pulo

ISKANDAR, M

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
PEMERINTAH GAMPONG DHAM PULO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN 1	ANGGARAN 2
<b>PENDAPATAN GAMPONG</b>	
Pendapatan Asli Gampong	14.000.000,00
Dana Desa	889.668.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	13.599.289,00
Alokasi Dana Gampong	210.119.000,00
SILPA Tahun Sebelumnya (SILPA 2021)	131.886.476,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.259.272.765,00</b>
<b>BELANJA</b>	
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG</b>	<b>294.535.320,00</b>
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	128.693.040,00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong	2.073.600,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	47.450.000,00
Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	37.200.000,00
Penyediaan Operasional TPG	855.000,00
Penyediaan Insentif Staf lainnya	9.600.000,00
Penyediaan Tunjangan Imeum Menasah	12.000.000,00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll)	7.875.000,00
Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun/Percik selain Perencanaan/Kuangan)	2.324.000,00
Dukungan Pelaksanaan Pilciksung	12.845.000,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG</b>	<b>214.331.718,00</b>
Penyelenggaraan TPQ / Honor teungku Beut Bakda Magrib	21.600.000,00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (obat, Insentif, KB, dsb)	12.110.000,00
Penyelenggaraan Popyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.822.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.000.000,00
Penyelenggaraan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	16.950.000,00
Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	4.500.000,00
Pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni - Fakhruil Jamil	84.899.718,00
Operasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	15.000.000,00
Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho Dll)	1.450.000,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>141.118.000,00</b>
Pembinaan Group Kesenian Dalalil Khairat	3.300.000,00
Pengiriman Peserta Perlombaan Kesenian & Kebudayaan	1.500.000,00
Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam	35.500.000,00
Rehab Prasarana Balai Pengajian/Keagamaan	3.000.000,00
Penyediaan Operasional Pengajian Masyarakat Gampong	12.460.000,00
Penyediaan Operasional Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Menjahit)	10.080.000,00
Penyediaan Operasional & Perlengkapan PKK	16.778.000,00
Peningkatan Sarana Prasarana PKK (Rehab & Pengadaan Tematak Gampong)	48.500.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>181.200.000,00</b>
Program Ketahanan Pangan (Penyediaan bibit Unggas & Pakan Unggas)	178.200.000,00
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	3.000.000,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>	<b>427.896.000,00</b>
Kegiatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	71.496.000,00
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	356.400.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.259.081.038,00</b>
<b>SISA LEBIH ANGGARAN</b>	<b>191.727,00</b>

DHAM PULO, 20 Januari 2022  
Keuchik Dham Pulo

ISKANDAR, M

## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



1. Pj Geuchik Desa Dham Pulo, Bapak Zainuddin



2. Sekretaris Desa, Bapak Gunawan Yusni





**3. Masyarakat dan Mantan Geuchik 2016-2022, Bapak Iskandar**



**4. Bendahara Desa, Bapak Ahmad Badawi**



**5. Ketua Tuha Peut, Bapak Amir Zaki Mubarak**



**6. Masyarakat, Bapak Ridwan**



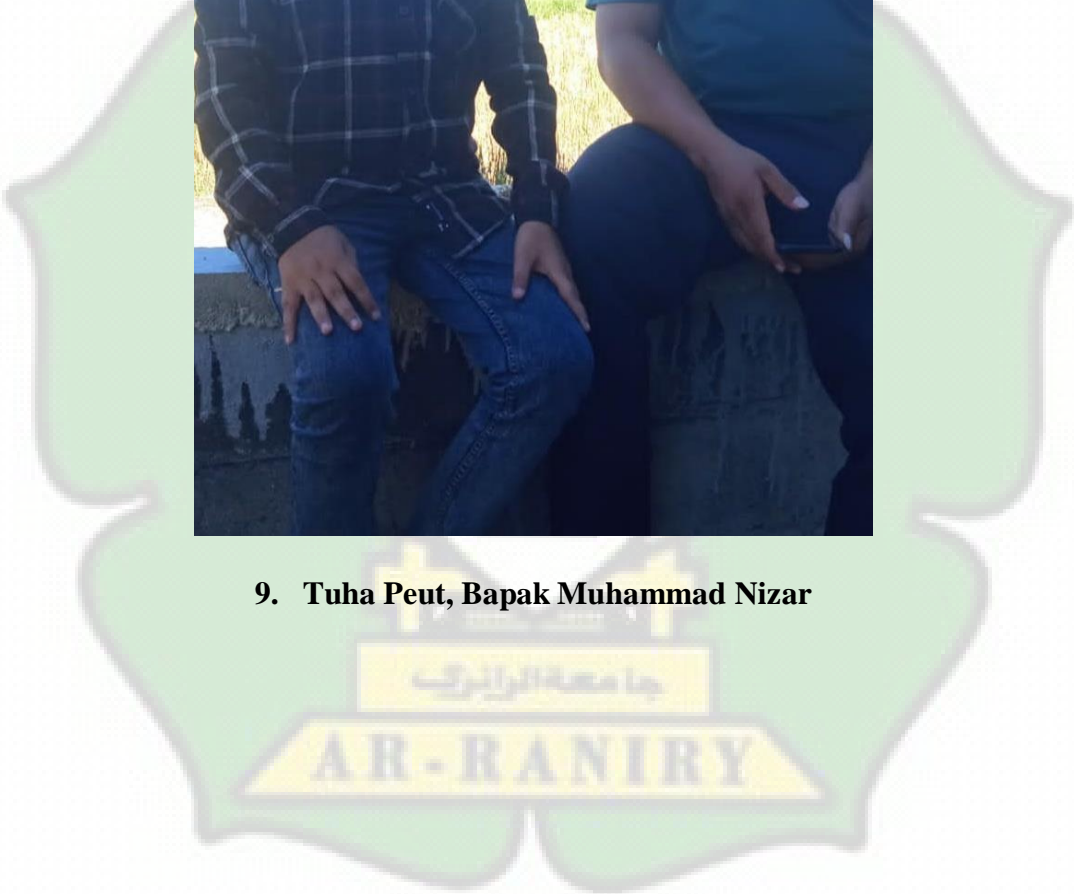
**7. Masyarakat, Bapak M. Nasir**



**8. Kaur Pembangunan, Bapak M. Sahid Kausar**



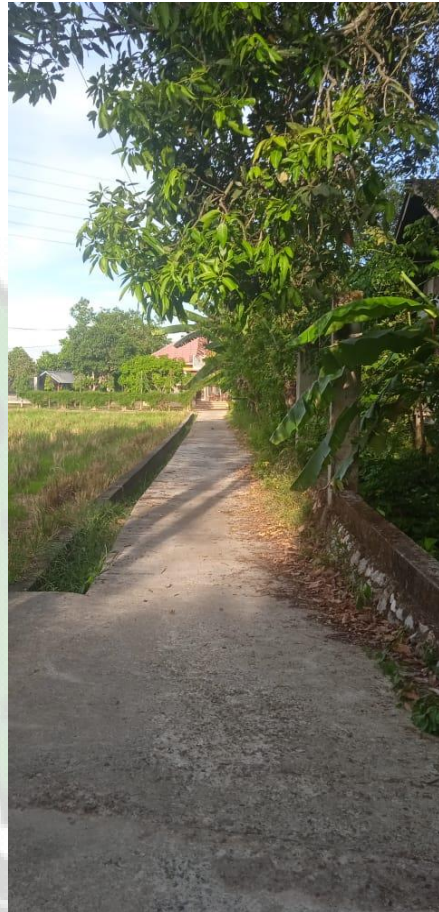
**9. Tuha Peut, Bapak Muhammad Nizar**



## Lampiran 6 Pembangunan Infrastruktur



**Rehabilitasi Kantor Geuchik**



**Rabat Beton**



**Sewa Rumah Gampong**



**Rumah Dhuafa**



**Jalan Yang Masih Harus Di Perbaiki**